

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

E-government di Indonesia mulai hadir karena adanya kebijakan pemerintah untuk mereformasikan pelayanan publik. Melalui Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*, ini bertujuan untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, dimana pemanfaatan ini tentu ditujukan untuk keseluruhan baik itu pusat sampai ke daerah- daerah, baik untuk tingkatan provinsi, kabupaten atau kota, termasuk juga Kabupaten Majalengka.

Majalengka merupakan salah satu kabupaten yang memulai pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelenggarakan urusan publik, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu artikel www.radarcirebon.com (8/12/17), menuliskan bahwa “Majalengka bakal terapkan *e-government*”.

Salah satu *e-government* di Majalengka yaitu open data yang merupakan sebuah media yang dipergunakan dilingkungan pemerintahan Majalengka, yang bertujuan untuk menampung berbagai kumpulan data terbuka yang bersumber dari berbagai SKPD, lembaga, atau institusi legal yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Majalengka. Data terbuka ini sebagai

perwujudan secara konkrit dari pihak pemerintah dalam meningkatkan transparansi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi terbaru guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, efektif dan akuntabel, hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Open data ini berbentuk *website* yang didalamnya terdapat berbagai kumpulan data- data sektoral dari setiap SKPD yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Majalengka, sehingga dengan adanya open data ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat ataupun pihak lain untuk mendapatkan data secara cepat dan mudah, serta menghindari adanya diskriminasi dalam mendapatkan sebuah data. Biasanya data- data ini sudah terstruktur dengan bentuk format berkasnya excel, csv ataupun pdf, serta dapat langsung di *download* oleh pengguna. Selain daripada itu, data- data yang berada dalam web open data yang penanggung jawabnya langsung oleh bidang statistik dinas komunikasi dan informatika Majalengka ini dapat dijamin keakuratan, kebenaran dan keaslian datanya, karena data tersebut langsung dikirim/ diminta langsung ke SKPD terkait. Dalam web tersebut, data dipublikasikan dalam satuan yang biasanya disebut dengan dataset, dengan kata lain bahwa dataset ini merupakan kumpulan data yang memiliki karakteristik sama, dan jika data tersebut ditelusuri lebih lanjut oleh pengguna, maka hasil dari pencarian yang terlihat akan menjadi kumpulan data individual atau dengan kata lain disebut *resources*.

The screenshot shows the 'disdukcapil Kab. Majalengka' website interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil', 'Kumpulan data' (44), 'Organisasi' (Dinas Kependuduka... (44)), 'Kategori' (None (1), Pendidikan (2), Kependudukan (41)), and 'Tag' (agama). The main content area displays '44 Dataset ditemukan' with a search bar and an 'Order by: Name Ascending' dropdown. Two dataset results are visible:

- Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan Di Kabupaten Majalengka**
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dirinci per Kecamatan Di Kabupaten Majalengka
Resource: 1
- Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka dirinci Per Kecamatan**
Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka dirinci Per Kecamatan
Resource: 2

Gambar 1.1 Tampilan Dataset

The screenshot shows the 'PEN DATA MAJALENGKA' website. The top navigation bar includes 'DATA', 'ORGANISASI', 'KATEGORI', 'VISUALISASI', 'PUBLIKASI', and 'TENTANG'. The breadcrumb trail is '/ Dataset / Jumlah Kepadatan Penduduk K...'. The main content area displays the dataset title 'Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka dirinci Per Kecamatan' and a description. Below this is the 'Data and Resources' section, which lists two resources:

- Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2017**
Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka dirinci Per Kecamatan [Detail]
- Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2016**
Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Majalengka dirinci Per Kecamatan [Detail]

At the bottom, there are filters for 'penduduk' and 'kecamatan'.

Gambar 1.2 Tampilan Resources

Untuk memberikan atau menyediakan suatu informasi yang benar dan akurat tersebut, maka salah satu kewajiban dari badan publik yang harus dilaksanakan, diantaranya yaitu membangun serta mengembangkan sebuah sistem informasi dan komunikasi yang dikelola secara baik dan efisien guna tersampainya informasi tersebut, hal ini sebagaimana Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam pasal 07 ayat (3) menyatakan bahwa “untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah”.

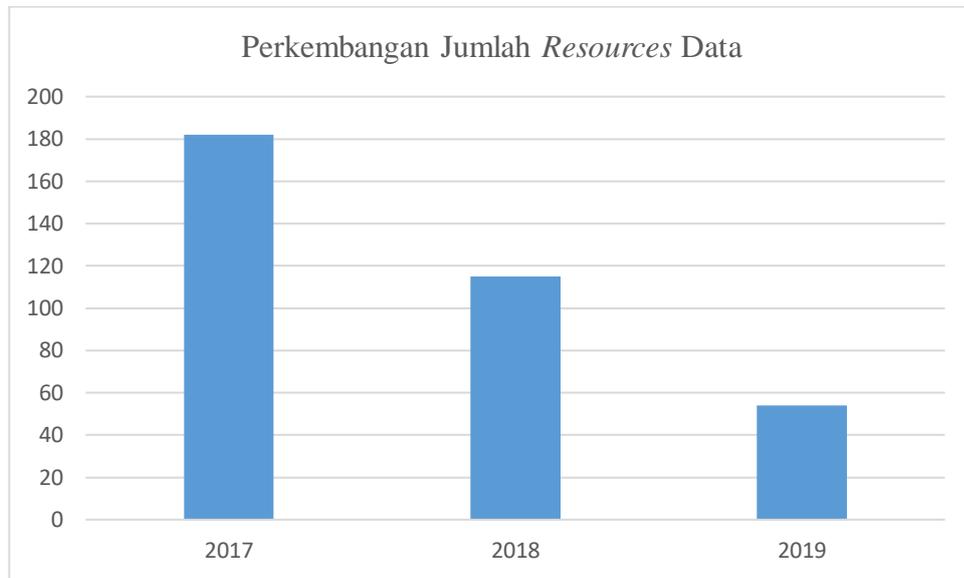
Dalam pelaksanaan pengembangan web open data tersebut, berdasarkan pengamatan peneliti, data- data sektoral yang ada di website open data ini masih kurang optimal, hal ini didasarkan pada data- data yang ada dalam open data tersebut masih banyak yang belum *ter-update*. Sebagaimana penuturan dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, yang menyebutkan masih adanya beberapa kendala dalam pengembangan Majalengka open data yang diantaranya adalah masih sedikitnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pengembangan open data tersebut, ditambah komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang masih belum optimal. Berikut update perkembangan data sektoral yang ada dalam open data:

Tabel 1.1
Jumlah *Resources* Data Tiap SKPD (2017-2019)

No	Nama Instansi	Jumlah Dataset	Jumlah Resource		
			2017	2018	2019
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	16	8	5	7
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	-	-	3
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	6	2	-
4	Badan pendapatan Daerah	-	-	-	-
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4	3	-	1
6	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	9	6	4	2
7	Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah	2	-	2	-
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	44	13	-	-
9	Dinas Kesehatan	95	12	11	2
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	125	8	5	-
11	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM	11	8	9	2
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	6	1	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	18	12	6	6
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10	3	3	4
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	19	18	11	-
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	7	5	-

17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4	2	2	-
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	4	2	1	2
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7	7	4	-
20	Dinas Pendidikan	79	1	1	8
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17	13	15	
22	Dinas Perhubungan	5	3	3	2
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14	14	7	-
24	Dinas Sosial	15	-	8	15
25	Inspektorat Kabupaten Majalengka	3	3	2	-
26	RSUD Cideres	5	4	-	-
27	RSUD Kabupaten Majalengka	7	8	4	-
28	Satpol PP	8	8	4	-
29	Sekretariat Daerah	5	4	-	-
30	Sekretariat DPRD	5	3	-	-

Sumber: Data diolah oleh penulis Tahun 2020



Gambar 1.3 Grafik Perkembangan Jumlah *Resources* Data
Sumber: Data diolah oleh penulis Tahun 2020

Dari tabel dan juga grafik di atas bisa dilihat bahwa, data yang di *up* ke web open data masih belum optimal, terlihat dari masih banyaknya dinas- dinas yang belum *update* data Tahun 2019, serta adanya penurunan jumlah data *resources* dari tahun ke tahunnya, sedangkan tujuan dari adanya web open data sendiri adalah untuk memberikan informasi data- data sektoral kepada publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN OPEN DATA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih kurang optimalnya tampilan website open data Majalengka, serta masih ada data- data sektoral Tahun 2019 dalam website open data Majalengka yang belum ter-*update*
2. Belum tercapainya efektivitas pengembangan open data Tahun 2019 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas pengembangan open data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengembangan open data di dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengembangan open data di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Majalengka tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan open data di dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam ilmu administrasi publik, yang secara khususnya berhubungan dengan efektivitas pengembangan *e-government* sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien..
- b. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi lebih banyak lagi mengenai efektivitas dalam pengembangan *e- government*.
- c. Bagi perguruan tinggi, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi civitas akademika.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa data dan informasi mengenai efektivitas pengembangan *e-government* sebagai inovasi pelayanan publik guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan wawasan bagi masyarakat dan peningkatan mutu kinerja pemerintah berbasis IPTEK.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang dilakukan ini berhubungan dengan jurusan yang peneliti ambil yaitu administrasi publik, karena dalam pembahasan pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu merupakan bagian dalam bahasan administrasi publik, sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh Chandler dan Plano yang dikutip Keban (2014:3) administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan- keputusan dalam kebijakan publik.

Keban (2014:10–11) menjelaskan bahwa didalam kajian administrasi publik ini terdiri dari enam dimensi strategis yang diantaranya adalah dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi struktur organisasi, dimensi etika, dimensi akuntabilitas publik dan juga dimensi lingkungan. Lebih lanjut, dalam sebuah kebijakan publik, adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh sejumlah aktor untuk mengatasi suatu permasalahan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mengenai efektivitas pengembangan e-government dengan studi kasus Majalengka open data ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memberikan akses keterbukaan informasi publik serta memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Peraturan yang terkait dalam melaksanakan kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi guna mengelola informasi publik dengan baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah adalah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 7 ayat (3) tentang kewajiban badan publik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum penelitian, penulis menemukan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan dari pelaksanaan open data Majalengka ini, permasalahan tersebut mengenai masih adanya data- data sektoral yang belum *ter-update* dalam open data tersebut,.

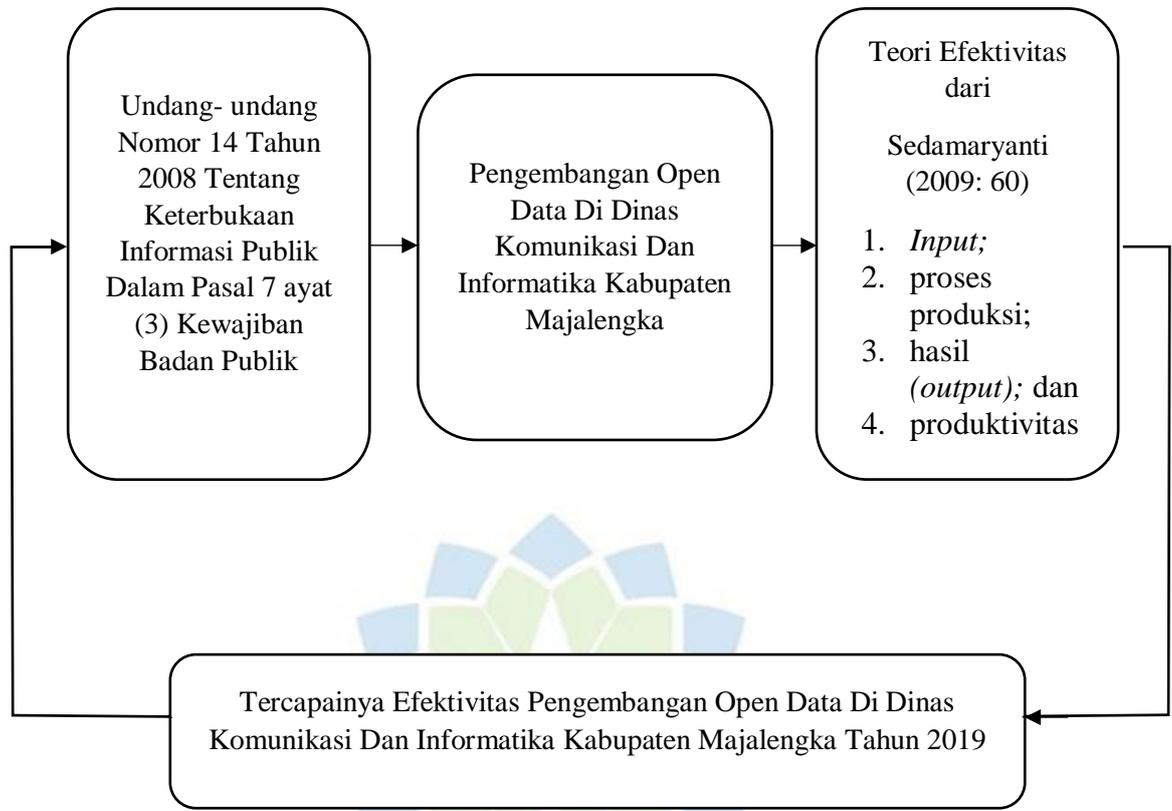
Sedarmayanti (2009:60), secara umum dalam mengukur efektivitas dibagi menjadi empat, yaitu melalui:

1. *Input*;
2. proses produksi;
3. hasil (*output*); dan
4. produktivitas.

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka permasalahan tersebut ikut mempengaruhi terhadap efektivitas pengembangan majalengka open data. Maka, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori dari Sedarmayanti.

Berdasarkan uraian di atas maka, maka kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran Pengembangan Open Data di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Majalengka

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka proposisi dalam penelitian ini adalah pengembangan open data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2019 akan dapat berjalan secara efektif jika *input*, proses produksi, *output* dan produktivitas dari pengembangan open data ini berjalan secara optimal.